

SKRIPSI



EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

(Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar
dan di Pengadilan Agama Makassar)

OLEH

NURUL FADHILLAH

B 111 09 432

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA**

(Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar
dan di Pengadilan Agama Makassar)

OLEH:

**NURUL FADHILLAH
B11109432**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

(Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar
dan di Pengadilan Agama Makassar)

Disusun dan diajukan oleh

NURUL FADHILLAH

B11109432

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

NIP. 19670205 199403 1 001

Sekretaris

Ratnawati, S.H., M.H.

NIP. 19690404 199802 2 002

**An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,**

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **NURUL FADHILLAH**

No. Pokok : **B 111 09 432**

Bagian : **HUKUM ACARA**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA**

(Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan
di Pengadilan Agama Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 10 Mei 2013

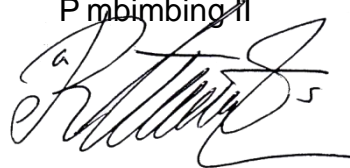
Pembimbing I



Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

NIP. 19670205 199403 1 001

Pembimbing II



Ratnawati, S.H., M.H.

NIP. 19690404 199802 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **NURUL FADHILLAH**

No. Pokok : **B 111 09 432**

Bagian : **HUKUM ACARA**

Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
PROSEDUR MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA**

(Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan di
Pengadilan Agama Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2013

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

NURUL FADHILLAH (B11109432), Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (*Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar*), di bawah bimbingan **Arfin Hamid** selaku pembimbing I dan **Ratnawati** selaku pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang menghalangi keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan memilih instansi terkait dengan perkara ini, yaitu dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat secara terstruktur. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan menelaah dokumen dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, data yang diperoleh dan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Perma di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, (2) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal di mediasi, (3) Faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar yaitu dari para pihak, ketidakmampuan mediator dan tidak adanya dukungan advokat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat merampungkan Penulisan skripsi dengan judul : Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Perbandingan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar)

Sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang Penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Kehadiran karya tulis ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik materil maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan Penulis, melalui pengantar skripsi ini secara khusus Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada **Ibu Ratnawati, S.H., M.H. dan Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.** yang senantiasa, meluangkan waktunya untuk membimbing Penulis hingga rampungnya penulisan skripsi ini.

Dari lubuk hati Penulis yang paling dalam dikhaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi atas segala perhatian yang diberikan kepada Penulis selama menjadi mahasiswa pada almamater Universitas Hasanuddin.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H. dan para Wakil Dekan atas segala perhatian dan bimbingannya.

3. Para Dosen Penguji, Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., Bapak Achmad, S.H., M.H., serta Ibu Rastiawaty, S.H., M.H. Atas semua masukan ilmu yang berharga untuk Penulis.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak berjasa mendidik Penulis sehingga berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Para staf administrasi di lingkungan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang banyak membantu Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Saudara-saudara dan Ipar Penulis Gemala Puji Astuty, S.E., AS Elim Akbar, S.E., Miranti Annisa, Reski Amelia, S.H., Faturrahman, S.H., Riska Arbianti, S.Pd, dan Nada Soraya. Semoga Allah selalu memberikan kesuksesan dan kebahagiaan tiada henti untuk kita semua.
7. Keponakan Penulis A. Muhammad Asyraf Athallah dan Aqilah Muqoddasah yang telah menjadi pelipur lara Penulis selama Penulisan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku tercinta, Andi Wira Pratiwi, S.H., Aulia Susantri, S.H., Reski Erawati, S.H., Muldiana, S.H., Mahardika Kusuma Dewi, Fitrahwaty Porwilah Syarif, S.H. dan Nurjihad Aifah Aniesah yang selama ini menjadi tempat berbagi suka dan dukaku.
9. Untuk teman seperjuanganku Indah Kurnia, S.H., Hijriah Maulani Nanda Syahputri, S.H., dan Arabia. Terima kasih untuk waktunya.
10. Segenap keluarga besar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KEMA-FHUUH), rekan-rekan Penulis dibawah naungan

“Doktrin” 2009, semoga kebersamaan ini menjadi memori indah dimasa yang akan datang.

11. Teman-teman KKN Reguler Angkatan 82 Universitas Hasanuddin khususnya Posko Desa Tindalun, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Semoga kita dapat menjaga tali silaturahmi
12. Ketua Pengadilan Negeri Makassar beserta staf dan jajarannya.
13. Ketua Pengadilan Agama Makassar beserta staf dan jajarannya.

Rampungnya karya tulis ini Penulis persembahkan untuk Ibundaku tercinta, Sri Agustini dan Ayahanda H. Nur Alim Saenong, B.E. atas doa, dukungan, keikhlasan, dan kasih sayang yang tiada hentinya, yang akan mengantarkan Penulis pada kesuksesan. Semua kesuksesan yang telah kuraih dan insya Allah akan kuraih kupersembahkan untuk kalian.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati tegur sapa yang konstruktif Penulis sambut demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga kehadiran skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan menambah literatur kajian ilmu hukum perdata.

Akhir kata Alhamdulillah Rabbil Alamin.

Makassar, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 7
A. Pengertian Efektivitas Hukum	7
B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.....	12
C. Tinjauan Umum Mediasi	18
1. Pengertian Mediasi	18
2. Dasar Hukum Penerapan Mediasi di Indonesia	22
	ix

	3. Prinsip-Prinsip Mediasi	25
	4. Tujuan dan Keuntungan Mediasi	26
	5. Peranan dan Fungsi Mediator	28
BAB III	METODE PENELITIAN	32
	A. Lokasi Penelitian	32
	B. Jenis Dan Sumber Data	32
	C. Teknik Pengumpulan Data	33
	D. Analisis Data	33
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
	A. Penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar	34
	B. Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar	37
	C. Faktor yang Menghambat Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar	43
BAB V	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain merupakan makhluk individu, juga berperan sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk dapat melakukan kerjasama dengan orang lain agar tercipta sebuah kehidupan yang selaras dan damai. Agar hubungan manusia dapat berjalan dengan selaras diperlukan aturan untuk mengatur masyarakat, maka dibuatlah aturan yang disebut norma. Norma merupakan aturan yang berlaku dimasyarakat.

Namun dengan adanya norma, tidak menutup kemungkinan timbul perselisihan di masyarakat. Salah satu perselisihan yang terjadi dimasyarakat adalah perkara perdata. Yang dimaksud dengan perkara perdata ialah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dalam hubungan keperdataan. Dalam hubungan keperdataan antara pihak yang sedang berperkara umumnya diselesaikan melalui pengadilan untuk mendapat keadilan yang seadil-adilnya.¹

Penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi diharapkan menjadi solusi terbaik bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum, dengan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam praktik tidak demikian, karena penyelesaian perkara di

¹ Sarwono, *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Sinar grafika: Jakarta. Hal. 5

pengadilan dapat berlarut-larut dengan proses yang sulit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu perlu adanya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG yang menyebutkan bahwa hakim mewajibkan mendamaikan para pihak terlebih dahulu sebelum proses persidangan. Hakim yang mengabaikan Pasal tersebut dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib beracara sehingga putusan hakim dianggap tidak sah dan pemeriksaan harus dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma), yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini sebagai dasar untuk mentaati pasal 130 HIR dan 154 RBG, yang dapat dijadikan pedoman tata tertib bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama guna memediasi para pihak yang berperkara. Dengan pertimbangan pada Perma poin (b) yang menjelaskan :

“Bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).”

Dalam Perma tersebut diatur bahwa sebelum diadakannya proses sidang, terlebih dahulu para pihak wajib mengikuti mediasi. Dimana pihak-pihak dipertemukan di ruang mediasi yang disediakan oleh Pengadilan. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini

merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.²

Perma ini merupakan penyempurnaan dari Perma sebelumnya, yakni Perma No. 2 Tahun 2003 karena ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermudah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan.³

Keberadaan Perma dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam Perma, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Bila hakim melanggar atau enggan menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) Perma). Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.⁴

² Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008.

³ Syahrizal Abbas, . *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) hal. 310

⁴ *Ibid*, halaman 311

Berdasarkan Pasal 4 Perma, jenis perkara yang dimediasi adalah semua perkara perdata kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Hal tersebut diatas menjadi latar belakang penulis untuk melihat efektivitas mediasi berdasarkan Perma di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar?
2. Bagaimanakah efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar?
3. Faktor apa yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kedua pokok permasalahan yang terangkum dalam 2 (dua) rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar
2. Untuk mengetahui efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa atau akademisi yang ingin mendalami lebih jauh mengenai hukum acara khususnya yang berkaitan dengan proses mediasi di pengadilan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi penelitian serupa serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum acara khususnya proses mediasi dalam di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar.

3. Untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi siapa saja yang terlibat dalam masalah peradilan, baik praktisi hukum maupun para hakim dan mediator di lingkungan Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas Hukum

Secara Etimologi kata Efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris “*effective*” yang telah mengintervensi kedalam bahasa Indonesia dan memiliki makna “berhasil” dalam bahasa Belanda “*effectiev*” memiliki makna “berdaya guna”.⁵

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaniingrat yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.⁶

Sedangkan menurut Agung Kurniawan, efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.⁷

⁵ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*, versi elektronik dapat dilihat di www.badilag.net

⁶ Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994) hal. 16

⁷ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Pamboran, 2005) hal. 109

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah dicapai, dimana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Selanjutnya pengertian efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut berlaku secara yuridis, sosialis, dan filosofis.⁸

Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain⁹:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus tertulis dengan jelas dan mampu

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Rajawali Pers: Bandung, 1996), hal. 53

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprunce)* Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2009) hal. 376

dipahami dengan secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang ada dalam wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya . tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitor*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakana tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang Indonesia. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.

- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancam sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistik, adalah mustahil untuk efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum. Mengancamkan sanksi bagi perbuatan yang sering dikenal dengan 'sihir' atau 'tenung', adalah mustahil untuk efektif dan dibuktikan.
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral

norma agama, norma adat isitiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.

- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut,; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dahsyat.

Sedangkan untuk mengetahui efektivitas dari perundang-undangan, tergantung beberapa faktor, antara lain¹⁰ :

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang-lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

¹⁰ *Ibid*, hal. 378

- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Oleh karena itu, pada umumnya, faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-perundangan, adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-perundangan tersebut.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Lahirnya acara mediasi melalui Perma, merupakan penegasan ulang terdapat Perma sebelumnya, yaitu nomor 2 tahun 2003. Dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan, terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrumen efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.¹²

¹¹ *Ibid*, hal. 379

¹² Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama*. versi elektronik dapat dilihat di: <http://badilag.net/artikel/2729-mediasi-dan-hakam-dalam-tinjauan-hukum-acara-peradilan-agama-oleh-sugiri-permana-sag-mh.html>

Semua perkara perdata yang masuk pada pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu mengikuti proses mediasi, kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹³

Mediasi di pengadilan dibagi atas dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan mediasi. Pada tahap pra mediasi, antara lain mengatur kewajiban hakim, hak para pihak memilih mediator, batas waktu pemilihan mediator, prinsip itikad baik. Selanjutnya tahapan mediasi meliputi penyusunan resume, lama waktu proses mediasi, kewenangan mediator, tugas-tugas mediator, keterlibatan ahli, mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan, dan akibat-akibat dari kegagalan mediasi.

1. Tahap Pra Mediasi

Apabila pada hari dan tanggal yang sudah ditentukan dan kedua pihak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 sebelum pemeriksaan perkara dimulai, hakim mewajibkan kedua pihak untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dengan cara mediasi.

Kemudian ketua majelis hakim menjelaskan prosedur mediasi yang harus ditempuh oleh kedua belah pihak sehubungan dengan mediasi yang

¹³ Ketentuan Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008

akan dilaksanakan.¹⁴ Sebagai langkah awal, hakim menyarankan kepada pihak untuk memilih mediator yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi.

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:¹⁵

- a) Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
- b) Advokat atau akademisi hukum.
- c) Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
- d) Hakim majelis pemeriksa perkara.
- e) Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.

Jika dalam suatu proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator sendiri.¹⁶

Setelah para pihak hadir pada hari sidang pertama, Hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan Hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal, yaitu dua hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib

¹⁴ Ketentuan Pasal 7 Ayat (6) Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁵ Ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁶ Ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2008

menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis Hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan mereka memilih mediator, ketua majelis Hakim segera menunjuk Hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.¹⁷

Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak dapat menyatakan mundur dari proses mediasi jika pihak lawan menempuh mediasi dengan iktikad tidak baik.¹⁸

2. Tahap-Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.¹⁹

Proses mediasi dapat berlangsung selama 40 (empat puluh) hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis Hakim. Atas dasar kesepakatan para pihak, masa proses mediasi dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa 40 (empat puluh) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para

¹⁷ Ketentuan Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁸ Ketentuan Pasal 12 Perma No. 1 Tahun 2008

¹⁹ Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Perma No. 1 Tahun 2008

pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.²⁰

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut. Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan Hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan tidak lengkap.²¹

Berdasarkan kesepakatan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat mengundang para ahli atau lebih untuk memberikan penilaian, penjelasan, pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Untuk menghindari masalah baru menyangkut pendapat ahli, maka para pihak harus

²⁰ Lihat ketentuan Pasal 13 Perma No. 1 Tahun 2008

²¹ Ketentuan Pasal 14 Perma No. 1 Tahun 2008

bersepakat terlebih dahulu, apakah pendapat ahli akan dianggap mengikat atau tidak.²²

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.²³

²² Ketentual Pasal 16 Perma No. 1 Tahun 2008

²³ Ketentuan Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2008

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika setelah batas waktu maksimal 40 (empat puluh) hari kerja, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab yang terkandung dalam Pasal 15 Perma No. 1 Tahun 2008, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud diatas, berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak hari para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.²⁴

C. Tinjauan Umum Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. 'Berada di tengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga

²⁴ Ketentuan Pasal 18 Perma No. 1 Tahun 2008

kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasehat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.

Banyak pihak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Peranan pihak ketiga tersebut adalah dengan melibatkan diri untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan dan mengembangkan sebuah proposal. Proposal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.²⁶

Dalam Perma, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 7, yaitu mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Dan pada dasarnya mediasi juga diatur dalam Buku ke-3 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dimana mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan dan disebut sebagai perdamaian dan pengertiannya terumus di dalam Pasal 1851 KUH Perdata, yang berbunyi:

“perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis.”

²⁵ Syahrizal Abbas, *Op.cit.* hal. 2

²⁶ Gatot Sumartono, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2006) hal. 119

Sementara itu di dalam rumusan pasal 1 butir 10 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Alternatif, menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Selanjutnya, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menerangkan tentang keuntungan mediasi sebagai berikut:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena hasil putusannya tidak dipublikasikan;
- b. Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. Para pihak dapat memilih arbiter (mediator) yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase (mediasi); dan
- e. Putusan arbiter (mediator) merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.²⁷

²⁷ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 4

Menurut Gary Goodpaster mengemukakan bahwa mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Berbeda dengan hakim dan arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan – persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan – persoalan yang dipersengketakan.²⁸

Menurut John W. Head dalam bukunya *Pengantar Hukum Ekonomi* sebagaimana dikutip oleh Gatot Sumartono bahwa mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpada pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut hanya dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut mediator dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi.²⁹

²⁸ Gary Goodpaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*, (Jakarta: ELIPS Project, 1993), hal. 201

²⁹ Gatot Sumartono, *Op.Cit*, hal. 120

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum* sebagaimana dikutip oleh Edi As'Adi bahwa pada dasarnya mediasi secara normatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁰:

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
- b. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
- c. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
- d. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersangkutan guna mengakhiri sengketa.

2. Dasar Hukum Penerapan Mediasi di Indonesia

a. Dasar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Dasar hukum penerapan Mediasi, yang merupakan salah satu dari sistem ADR di Indonesia adalah³¹:

- 1) Pancasila sebagai dasar ideologi negara Republik Indonesia yang mempunyai salah satu azas musyawarah untuk mufakat.

³⁰ Edi As'Adi, *op.cit*, hal. 6

³¹ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009) hal. 164

- 2) UUD 1945 adalah konstitusi negara Indonesia dimana azas musyawarah untuk mufakat menjawai pasal-pasal didalamnya.
- 3) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Penjelasan Pasal 3 menyatakan: “penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 4 ayat (2) menyatakan: “Ketentuan ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.
- 4) Secara *Administrative type ADR* telah diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; UU No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU No. 30 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 30 tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit; UU No. 14 tentang Paten; UU No. 15 tahun 2001 tentang Merk; UU No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan; UU No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Perusahaan Swasta; UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Hidup; dan PP No. 54 tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan; PP No. 29 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Damai sebagaimana dalam pasal 130 HIR/Rbg.

6) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) No. 2 tahun 2003 yang telah dirubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008.

b. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (*Court Connected Mediation*)

Di Indonesia mediasi/perdamaian yang bersifat wajib sampai saat ini hanya diberlakukan untuk sengketa-sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri/Agama. Penggunaan prosedur mediasi wajib ini, dimungkinkan karena hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, HIR dan RBG Menyediakan dasar hukum yang kuat. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg menyatakan bahwa hakim diwajibkan untuk terlebih dahulu mengupayakan proses perdamaian, namun caranya belum diatur, sehingga ada kekosongan yang perlu diatur oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran jalannya peradilan. Oleh sebab itu dan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan pasal tersebut, dikeluarkan SEMA No. 1 tahun 2002 yang mewajibkan semua majelis hakim menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan pasal 130 HIR/154 Rbg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.³²

Keadaan itu mendorong Mahkamah Agung untuk menerbitkan Perma Nomor 2 tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan PERMA

³²Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, halaman 168

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dasar hukum inilah (penggunaan mediasi bersifat wajib) yang dalam perkembangannya kemudian diberlakukan untuk konteks-konteks tertentu seperti diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

3. Prinsip-Prinsip Mediasi

Menurut Hoynes mengemukakan bahwa dalam berbagai literature ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.³³

Dan menurut Ruth Carlton bahwa terdapat lima prinsip dasar mediasi, yaitu sebagai berikut³⁴:

a. *Confidentially* (kerahasiaan)

Kerahasiaan yang dimaksudkan disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.

b. *Volunteer* (sukarela)

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan

³³ Syahrizal Abbas, *Op.Cit*, hal. 28

³⁴ *Ibid*, hal. 28

tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

c. *Empowerment* (pemberdayaan)

Bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.

d. *Neutrality* (netralitas)

Di dalam mediasi, peran mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

e. *A Unique Solution* (solusi yang unik)

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

4. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial.

Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).³⁵

Mediasi juga dapat memberikan keuntungan antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.

³⁵ *Ibid*, hal. 24

- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.³⁶

5. Peranan dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁷

Ciri-ciri penting dari mediator adalah :

- a. Netral.
- b. membantu para pihak,
- c. tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁸

Dalam praktik, mediator berbicara secara rahasia dengan masing-masing pihak. Disini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan

³⁶ Syahrizal Abbas, *Op. Cit*, hal. 25

³⁷ Ketentuan Pasal 1 angka 6 Perma Nomor 1 Tahun 2008

³⁸ *Mediasi*, versi elektronik dapat dilihat di: http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/515E-PROSEDUR_MEDIASI.pdf

mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri dan melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasa dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan.³⁹

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antarpada pihak.⁴⁰

Menurut Howard Raiffa melihat peran mediator sebagai sebuah kontinum atau garis rentang. Yakni dari sisi peran yang terlemah hingga peran yang terkuat. Sisi peran terlemah adalah apabila mediator hanya menjalankan perannya sebagai berikut⁴¹:

- 1) Penyelenggara pertemuan.
- 2) Pemimpin diskusi rapat.
- 3) Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berlangsung secara beradab.
- 4) Pengendali emosi para pihak.
- 5) Pendorong pihak/berunding yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

³⁹ Gatot Sumartono, *Op.Cit.* hal. 120.

⁴⁰ Syahrizal Abbas, *Op.Cit.* hal. 77

⁴¹ Nurnaningsih Amriah, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hal. 62

Selanjutnya Raiffa dikutip oleh Nurnaningsih Amriah mengemukakan sisi peran yang kuat diperlihatkan oleh mediator, apabila mediator bertindak atau mengerjakan hal-hal dalam proses perundingan, sebagai berikut⁴²:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak.
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi untuk diselesaikan.
- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif penyelesaian masalah.
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah.

Riskin menyebutkan 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni sebagai *catalyst, educator, translator, resource person, bearer of bad news, agent of reality* dan *scapegoat*.⁴³

- 1) Sebagai “katalisator”, mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi.
- 2) Sebagai “pendidik”, berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus

⁴² *Ibid*, hal.63

⁴³ Nazarkhan Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 138

berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak.

- 3) Sebagai “penerjemah”, berarti mediator harus berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul.
- 4) Sebagai “narasumber”, berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia.
- 5) Sebagai “penyandang berita jelek”, berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu mediator harus mengadakan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan.
- 6) Sebagai “agen realitas”, berarti mediator harus berusaha member pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin/tidak masuk akal akan tercapai melalui perundingan.
- 7) Sebagai “kambing hitam”, berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar tempat diselenggarakannya mediasi di wilayah hukum pengadilan tingkat pertama di kota Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar, narasumber, dan pihak-pihak terkait dengan penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data atau dokumen yang diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur, serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer pada instansi atau pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan baik dalam data primer maupun data sekunder dianalisa secara kualitatif, kemudian dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perma No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar

Penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar menggunakan sistem *court connected mediation*. Penerapan mediasi di kedua lembaga peradilan tersebut berdasarkan Perma. Maka sebelum dilakukan proses sidang, perkara gugatan yang didaftarkan harus dilakukan proses mediasi.

Pada hari sidang pertama majelis hakim mempersilahkan para pihak untuk melakukan mediasi. Para pihak dipersilahkan memilih mediator dari luar maupun dari pengadilan. batas waktu pelaksanaan mediasi selama 40 hari kerja ditambah 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Apabila mediasi gagal dibuatkan berita acara, selanjutnya perkara dikembalikan kepada majelis hakim.

Dalam kategori ini proses mediasi sesuai dengan apa yang ditentukan Pasal 7 ayat (1) Perma yang berbunyi: *“pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”*. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa:

Para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan

- b. *Advokat atau akademisi hukum*
- c. *Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa*
- d. *Hakim majelis pemeriksa perkara*
- e. *Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan dalam butir b dan d, atau gabungan dalam butir c dan d.*

Dengan demikian, umumnya seluruh mediator yang dimaksud di pasal tersebut dapat menjadi mediator dalam pengadilan. Namun berdasarkan pengamatan Penulis pada Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar hanya menggunakan hakim sebagai jasa mediator.

Pelaksanaan mediasi maksimal 14 hari ditambah 14 hari sejalan dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim, selanjutnya atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat 3. Walaupun selama ini yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar maupun Pengadilan Agama Makassar bahwa pada umumnya mediasi selesai dalam waktu yang relatif cepat dan tidak sampai 40 hari.

Apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana dijelaskan dengan Pasal 18 ayat (2) bahwa: "*Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku*".

Sebelum diterapkan Perma yang juga merupakan revisi dari Perma No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Makassar bahwa ia tidak pernah mengupayakan damai sebelum proses sidang dimulai, karena menurutnya tidak ada sanksi mengikat ketika tidak menjalankan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, namun ia senantiasa menganjurkan damai dalam proses persidangan khususnya untuk perkara perceraian dimana pertimbangan hakim tersebut adalah anak-anak dari kedua belah pihak tersebut.⁴⁴ Berbeda dengan hakim di Pengadilan Agama Makassar, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar selalu patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg. Ia selalu mengupayakan perdamaian sebelum proses sidang, karena sebelumnya tidak ada ruangan mediasi maka dilakukan di ruang sidang. Beliau juga mengatakan bahwa pada sidang pertama ia menganjurkan agar para pihak berdamai kemudian sidang akan ditunda 2 (dua) minggu kedepan, apabila tidak terjadi perdamaian maka sidang tersebut dilanjutkan.⁴⁵

Setelah diterbitkan Perma, maka setiap sengketa perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar harus melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dengan peraturan tersebut.

⁴⁴ Wawancara dengan Mustamin Dahlan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 April 2013

⁴⁵ Wawancara dengan Railan Silalahi, Hakim di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2013

Penerapan Perma baik di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar sudah berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dengan kata lain telah patuh terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg.

B. Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar

Perma sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi secara konseptual atau esensialnya sama dengan upaya perdamaian sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg. Oleh sebab itu, jika para pihak maupun hakim pemeriksa tidak mematuhi peraturan tersebut. Maka hal itu dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedua pasal dimaksud yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Penggunaan mediasi secara wajib tidak diartikan bahwa para pihak diwajibkan mencapai atau menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak dapat dipaksakan atau diwajibkan, tetapi harus merupakan hasil kesadaran dan keinginan bersama. Pengaturan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Mahkamah Agung sebagai penyelenggara peradilan diatur dalam Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Mahkamah Agung). Lahirnya suatu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai tujuan untuk kelancaran dalam proses penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam

pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar proses peradilan terselenggara dengan seksama dan wajar serta tetap berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peran lainnya juga sebagai fungsi mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Tujuan dari pembuatan suatu Peraturan Mahkamah Agung adalah sebagai bentuk penerapan dari Pasal 79 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang berisi ketentuan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Mediasi dilakukan sebagai tahap awal proses persidangan, dimana hakim mediator akan memproses sebuah perkara setelah sebelumnya diberitahukan oleh Ketua Majelis. Sedangkan hasil dari proses mediasi hanya ada dua kemungkinan yaitu berhasil dan tidak berhasil.

Untuk mengetahui tolak ukur efektivitas Perma di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1 Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Makassar tahun 2011

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Perceraian	89	7	7,86%	82	92,13%
2.	Perbuatan Melawan Hukum	63	2	3,17%	61	96,83%
3.	Tanah	40	1	2,5%	39	97,5%
4.	Wanprestasi	20	2	10%	18	90%
5.	Perlawanan	16	1	6,75%	15	93,25%
6.	Utang Piutang	10	2	20%	8	80%
7.	Harta Bersama	3	2	66,6%	1	33,33%
8.	Kewarisan	2	2	100%	0	0%
Jumlah		243	19	7,82%	224	92,18%

Sumber data : Bagian Hukum Perdata Pengadilan Negeri Makassar

Sedangkan jumlah perkara yang dimediasi tahun 2012 di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilihat dalam Tabel 2 dibawah ini.

Tabel 2 Perkara yang dimediasi di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2012

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Perceraian	96	8	8,33%	88	91,66 %
2.	Perbuatan Melawan Hukum	67	2	2,98%	65	97,02%
3.	Tanah	49	1	2,04%	48	98,86%
4.	Wanprestasi	18	2	11,11%	16	88,89%
5.	Perlawanan	27	2	7,41%	25	92,59%
6.	Utang Piutang	4	2	50%	2	50%
7.	Harta Bersama	1	1	100%	0	0%
8.	Kewarisan	3	1	33,33%	2	66,67%
9.	Pembatalan Akta	4	0	0%	4	100%
10.	Sita Jaminan	8	2	25%	6	75%

11.	Sewa Menyewa	3	1	33,33%	2	66,67%
12.	Pengosongan Lahan	5	0	0%	5	100%
Jumlah		285	22	7,72%	263	92,28%

Sumber Data : Bagian Hukum Perdata Pengadilan Negeri Makassar

Berdasarkan tabel 1 (satu) dan tabel 2 (dua), penulis menguraikan bahwa pada tahun 2011 perkara yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Makassar hanya 19 dari 243 perkara atau hanya 7,82%. Sedangkan pada tahun 2012 perkara yang berhasil dimediasi adalah 22 dari 285 perkara atau hanya 7,72%. Terjadi penurunan terhadap keberhasilan penyelesaian perkara dengan mediasi.

Untuk jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 Perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Cerai Gugat	99	3	3,03 %	96	96,97%
2.	Cerai Talak	72	6	8,33 %	66	91,67 %
3.	Kewarisan	8	1	12,50 %	7	87,50 %
4.	Harta Bersama	5	0	0	5	100
5.	Perlawanan Eksekusi	1	0	0	1	100
6.	Tidak diketahui	163	1	0,61%	162	99,39%
Jumlah		348	11	3,16%	337	96,84%

Sumber data : Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar⁴⁶

⁴⁶ Data yang Penulis ambil merupakan data dari bulan maret hingga bulan desember 2011, namun masih banyak yang dalam proses mediasi. Tetapi terdapat data tahunan dalam laporan paniteraan bahwa di dalam data tersebut disebutkan bahwa ada 11 perkara yang berhasil dari 348 perkara. Namun tidak diketahui secara rinci jenis

Sedangkan jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Makassar Pada Tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4 Perkara yang di mediasi di Pengadilan Agama Makassar Tahun 2011

No.	Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil		Tidak Berhasil	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Cerai Gugat	144	4	2,8%	140	97,2%
2.	Cerai Talak	135	1	0,74%	134	99,26%
3.	Kewarisan	4	0	0%	4	100%
4.	Harta Bersama	5	0	0%	5	100%
5.	Izin Poligami	1	1	100%	0	0%
6.	Hadhanah	2	1	50%	1	50%
7.	Pembatalan Nikah	2	0	0%	2	100%
8.	Eksekusi Syariah	1	0	0%	1	100%
9.	Tidak Diketahui	122	4	3,28%	118	96,72%
Jumlah		416	11	2,64%	405	97,36%

Sumber Data: Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar⁴⁷

Dari tabel 3 (tiga) dan tabel (4), penulis menguraikan bahwa pada tahun 2011 adalah hanya 11 dari 348 perkara yang berhasil dimediasi atau hanya 3,16%. Sedangkan pada tahun 2012 keberhasilan dari mediasi adalah hanya 11 dari 416 perkara atau 2,64%. Terjadi penurunan terhadap keberhasilan penyelesaian perkara dengan mediasi.

perkara apa yang berhasil di mediasi, selain dari 10 (sepuluh) perkara yang berhasil dimediasi yang Penulis temukan.

⁴⁷ Data yang Penulis ambil merupakan data dari bulan Januari hingga bulan desember 2012, namun masih banyak yang dalam proses mediasi. Tetapi terdapat data tahunan dalam laporan paniteraan bahwa didalam data tersebut disebutkan bahwa ada 11 perkara yang berhasil dari 416 perkara. Namun tidak diketahui secara rinci jenis perkara apa yang berhasil dimediasi, selain dari 7 (tujuh) perkara yang berhasil dimediasi yang penulis temukan.

Dari hasil penelitian, Pengadilan Negeri Makassar memiliki tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi daripada Pengadilan Agama Makassar. Meskipun Pengadilan Negeri Makassar memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi daripada Pengadilan Agama Makassar, namun perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Persentase angka ini belum menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan. Karena tujuan diterbitkannya Perma yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Sementara angka yang diperoleh di Pengadilan Negeri Makassar masih sedikit.

Di Pengadilan Agama Makassar sendiri, tingkat keberhasilan mediasi juga masih kurang. Namun menurut hakim di Pengadilan Agama Makassar, pelaksanaan Perma sudah efektif karena rata-rata perkara yang digugat merupakan perkara kumulasi. Dimana perkara pokoknya adalah perkara perceraian sedangkan perkara *accessoire* (pelengkap) merupakan harta bersama, hadhanah, dan lain sebagainya. Sekalipun pada perkara pokoknya tidak berhasil dimediasi. Namun lebih sering berhasil pada perkara *accessoire* sehingga apabila dilanjutkan dilitigasi, maka proses persidangan berjalan dengan cepat karena perkara *accessoire* sudah disepakati pada saat proses mediasi.⁴⁸

Berdasarkan persentase, penyelesaian perkara dengan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2011 adalah sebesar 7,82% dan pada tahun 2012 adalah sebesar 7,72% sedangkan di Pengadilan Agama

⁴⁸ Wawancara dengan Mahmuddin, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 April 2013

Makassar pada tahun 2011 hanya 3,16% dan pada tahun 2012 adalah sebesar 2,64%, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal dimediasi.

C. Faktor yang Menghambat Efektivitas Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar

Adapun faktor–faktor yang menjadi hambatan dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Para Pihak

Pada dasarnya mediasi di pengadilan merupakan kewajiban untuk diikuti oleh para pihak. Tidak mengikuti proses mediasi maka putusan akan batal demi hukum. Oleh sebab itu para pihak menganggap bahwa mediasi hanyalah prosedur yang bersifat formalitas belaka. sehingga banyak pihak enggan untuk berdamai saat mediasi karena ingin melanjutkan pada proses litigasi.⁴⁹

Kesulitan saat berdamai oleh para pihak di Pengadilan Negeri Makassar dilatar-belakangi dengan faktor gengsi belaka. Para pihak enggan untuk memulai suatu perdamaian, karena didasari oleh ego para

⁴⁹ Wawancara dengan Nathan Lambe, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar Pada Tanggal 10 April 2013

pihak masing-masing. Belum lagi apabila para pihak yang berperkara selalu merasa memiliki atas obyek sengketa, terlebih untuk kasus sengketa tanah.⁵⁰

Tidak ada niat dari salah satu pihak untuk mengikuti mediasi juga merupakan salah satu faktor penghambat dari sebuah mediasi. Keengganan salah satu pihak tersebut untuk hadir saat mediasi dilatarbelakangi oleh ketidakseriusan untuk berdamai. Sehingga pihak tersebut meminta kuasa hukum untuk mewakilinya saat mediasi, padahal para pihak yang bersengketa secara *inperson* sulit untuk menemukan titik temu. Tidak adanya pertemuan secara langsung menghilangkan kesempatan bagi para pihak untuk mengutarakan keinginan-keinginan menyampaikan duduk perkaranya.⁵¹

Pada kasus perceraian, faktor perasaan menjadi penghambat atas keberhasilan mediasi. Mediator sulit untuk mempersatukan pasangan tersebut karena pada dasarnya pihak-pihak yang ingin bercerai sudah tidak memiliki perasaan terhadap pasangannya satu sama lain. Pada umumnya sebelum salah satu pihak (penggugat) mengajukan gugatannya di pengadilan, ia telah memikirkan secara matang keputusannya untuk bercerai entah itu karena perselisihan yang berlarut-larut, telah lama pisah ranjang dan sebagainya. Dan umumnya kedua pihak tersebut sudah menempuh jalur damai secara kekeluargaan namun tak kunjung

⁵⁰ Wawancara dengan Railan Silalahi, Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2013

⁵¹ Wawancara dengan Mustamin Dahlan, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 April 2013

menemukan titik temu. Oleh sebab itu salah satu pihak tersebut mengajukan gugatannya di pengadilan.⁵²

2. Faktor Ketidakmampuan Mediator

Dari ketentuan Perma dipahami bahwa esensi dari mediasi adalah perundingan antara para pihak bersengketa dipandu oleh pihak ketiga (*mediator*). Perundingan akan menghasilkan sejumlah kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan. Dalam perundingan dilakukan negosiasi antara para pihak mengenai kepentingan masing-masing pihak yang dibantu oleh mediator. mediator dalam memediasi para pihak bertindak netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Pemihakan mediator kepada salah satu pihak akan mengancam gagalnya mediasi. Mediator berupaya menemukan kemungkinan alternatif penyelesaian sengketa para pihak. Mediator harus memiliki sejumlah keterampilan (*skill*) yang dapat membantunya mencari sejumlah kemungkinan penyelesaian sengketa.

Mediator yang dimaksud dalam Perma ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya pada pengadilan. mediator yang bertugas di pengadilan dapat saja berasal dari hakim yang menjalankan tugas mediasi setelah ada penunjukan dari ketua majelis hakim. Hakim yang bertindak sebagai mediator bukanlah hakim yang menangani perkara yang sedang dimediasi, tetapi hakim lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara yang diperiksa.

⁵² Wawancara dengan Mahmuddin, Hakim Mediator di Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 April 2013

Mediator di Pengadilan Negeri Makassar umumnya merupakan hakim dari Pengadilan Negeri Makassar. Dari sekian hakim di Pengadilan Negeri hanya ada 2 (dua) hakim yang telah mengikuti pelatihan mediator. Salah satunya adalah Nathan Lambe, SH, MH yang juga merupakan narasumber dari penelitian penulis. ia telah mengikuti pelatihan mediator namun pelatihan tersebut tidak bersertifikat.

Senada yang terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, di Pengadilan Agama juga menggunakan hakim sebagai mediator. Beberapa hakim juga telah mengikuti pelatihan mediator. Namun hanya ada 2 (dua) hakim yang telah memiliki sertifikat mediator.

Pasal 5 ayat (1) Perma mewajibkan bahwa mediator baik dari kalangan hakim maupun bukan hakim wajib memiliki sertifikat sebagai mediator. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan Perma di pengadilan, karena belum adanya sertifikat mediator menjadikan hakim tidak mampu untuk memediasi suatu perkara.

Sangat penting untuk seorang hakim mediator mengikuti pembekalan mengenai mediasi selain untuk menjalankan amanat dari Pasal 5 ayat (1) Perma, karena untuk menjadi mediator diperlukan keterampilan (*skill*) melalui pembekalan khusus mengenai mediasi.

Menurut pengamatan penulis terhadap praktek mediasi yang dijalankan oleh mediator yang berasal dari hakim, terlihat bahwa mediator cenderung memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim didepan persidangan disaat melangsungkan mediasi.

Lebih jauh lagi dampak dari tidak dipahaminya tugas dan fungsi mediator dengan baik, maka sebagian mediator yang berasal dari hakim sering melontarkan ucapan yang terkesan pesimistik dan antipati terhadap pelaksanaan mediasi. Bahkan sebagian hakim menganggap tugas sebagai mediator adalah beban dan tanggung jawab baru yang hanya memberatkan dan atau merugikan. Tentu saja hal ini sangat disayangkan, sebagai refleksi dari ketidakmengertian tentang hakikat dan tujuan mediasi. Disamping itu, para hakim telah terbiasa dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang bersifat memutus (ajudikatif). Akibatnya, ketika diberikan tugas untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non litigasi, terasa asing dan menyulitkan.

Dari pengamatan penulis juga ditemukan bahwa belum ada mediator nonhakim yang pernah memediasi perkara di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar. Padahal Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Agama Makassar sangat mengharapkan mediator yang memiliki keterampilan agar mediasi berjalan dengan efektif.

3. Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat

Advokat adalah orang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama advokat adalah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak-hak yang semestinya dalam melakukan tindakan hukum.

Namun salah satu kendala pada saat mediasi adalah tidak adanya dukungan advokat bagi para pihak untuk mengikuti mediasi. Dari wawancara dengan para hakim, semua bersepakat bahwa tidak adanya dukungan advokat tersebut dilatar-belakangi oleh kepentingan advokat untuk memperoleh materi semata.

Advokat cenderung ingin melanjutkan perkara tersebut secara litigasi agar mendapat honor yang banyak dari kliennya. Biasanya advokat tersebut menerima honorarium berdasarkan dari jam kerja atau frekuensi kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat selesai maka honor yang didapatkan pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, banyak pihak yang ingin melakukan damai saat mediasi namun dipengaruhi oleh advokatnya agar melanjutkan perkara tersebut secara litigasi. Namun tidak semua advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendukung terjadinya perdamaian.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Hakim Railan Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar tanggal 10 April 2013

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Perma di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri Makassar maupun di Pengadilan Agama Makassar telah terlaksana dengan baik sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut.
2. Berdasarkan persentase perkara yang dimediasi, Pengadilan Negeri Makassar memiliki tingkat keberhasilan mediasi lebih tinggi daripada Pengadilan Agama Makassar. Meskipun Pengadilan Negeri Makassar memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dari Pengadilan Agama Makassar, namun perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Persentase angka ini belum menunjukkan keberhasilan mediasi yang memuaskan. Karena tujuan diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2008 yaitu untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama belum efektif. Hal ini disebabkan karena masih banyak perkara yang gagal dimediasi.
3. Adapun faktor-faktor yang menjadi hambatan keberhasilan mediasi adalah sebagai berikut:

- a) Faktor Para Pihak;
- b) Faktor Ketidakterampilan Mediator; dan
- c) Faktor Tidak Adanya Dukungan Advokat.

B. Saran

Terkait dengan hasil penelitian, maka beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat menyelesaikan perkara secara mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
2. Agar setiap mediator di Pengadilan Negeri Makassar dan di Pengadilan Agama Makassar wajib mengikuti pelatihan mediator bersertifikat yang telah mendapat akreditasi dari Mahkamah Agung dalam rangka mengoptimalkan proses mediasi.
3. Kepada Mahkamah Agung disarankan agar membuat suatu aturan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada pihak yang menghalangi proses mediasi dalam rangka mengoptimalkan keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana: Jakarta.
- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Telaga Ilmu: Jakarta.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pers: Jakarta.
- As'Adi, Edi. 2012. *Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi, dan Arbitrase*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Goodpaster, Gary. 1993. *dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi*. Elips Project: Jakarta.
- Handayaniingrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. CV. Haji Masagung: Jakarta.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan: Yogyakarta.
- Lubis, Sulaikin. 2008. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Kencana: Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bina Aksara: Jakarta.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta
- Simanjuntak, P.N.H. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Djambatan: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pres: Bandung.
- Subekti. R. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramitha: Jakarta
- Sumartono, Gatot. 2006. *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Yasin, Nazarkhan. 2004. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

JURNAL

Mardani, 2009. “Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16*, 16 April 2009.

PERATURAN-PERATURAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- HIR/RBg
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SITUS INTERNET

Hakim, Nurul. “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan” dapat dilihat di <http://www.badilag.net> diakses tanggal 20 November 2012

Mediasi, versi elektronik dapat dilihat di: [http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/515E-PROSEDUR MEDIASI.pdf](http://www.pta-bandung.go.id/uploads/arsip/515E-PROSEDUR_MEDIASI.pdf) diakses tanggal 20 November 2012

Permana, Sugiri. “Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama”. dapat dilihat di: <http://www.badilag.net> diakses tanggal 28 April 2013.